

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengelolaan Keuangan Negara

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, keuangan negara meliputi semua hak dan tanggung jawab negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara dalam rangka menjalankan hak dan tanggung jawab tersebut. Dalam konteks pengelolaan anggaran, negara bertanggung jawab atas alokasi, penggunaan, dan laporan pertanggung jawaban dari setiap anggaran yang dikeluarkan dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas agar tujuan pemerintah dapat tercapai secara optimal.

2.1.2 Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara

Agar pengelolaan anggaran dapat berjalan dengan baik, terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diterapkan, yaitu :

1. Akuntabilitas: Pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Efisiensi dan efektivitas: Penggunaan anggaran harus dilakukan dengan cara yang memberikan manfaat maksimal dengan biaya yang minimal.
3. Transparansi: Proses pengelolaan anggaran harus terbuka dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang.
4. Kepatuhan terhadap regulasi: Semua aktivitas pengelolaan anggaran harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

2.1.3 Sistem Pengelolaan Anggaran di Satuan Kerja

2.1.3.1 Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

DIPA adalah dokumen yang berfungsi menjadi pedoman dalam pelaksanaan anggaran di satuan kerja. DIPA memuat tentang rincian pagu anggaran, rencana kegiatan dan target kinerja yang harus dicapai selama satu tahun anggaran. Penyusunan DIPA harus mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku, serta harus menyelaraskan antara rencana dan kebutuhan riil di satuan kerja.

2.1.3.2 Revisi DIPA

Revisi DIPA merupakan perubahan yang dilakukan pada anggaran yang sudah ditetapkan dalam DIPA untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang timbul selama pelaksanaan anggaran. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan proses revisi DIPA, seperti perubahan kebijakan pemerintah, perubahan kebutuhan anggaran yang mendesak atau adanya kegiatan yang tidak terduga.

2.1.4 Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

2.1.4.1 Pengertian SAKTI

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan keuangan di satuan kerja pemerintah. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, penerapan, hingga pelaporan keuangan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2.1.4.2 Modul dalam aplikasi SAKTI

Sebelum adanya SAKTI, satuan kerja menggunakan beberapa aplikasi yang terpisah untuk setiap proses, seperti SAS untuk pembayaran, SIMAK-BMN untuk

pengelolaan aset, dan SAIBA untuk pelaporan. Penggunaan aplikasi yang terpisah-pisah ini mengakibatkan kurangnya efisiensi dan meningkatkan potensi terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Dengan adanya aplikasi SAKTI, yang memiliki beberapa modul utama yang digunakan dalam pengelolaan keuangan di satuan kerja. Modul-modul tersebut membantu proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran secara lebih terintegrasi dan efisien. Berikut adalah beberapa modul dalam aplikasi SAKTI :

1. Modul Penganggaran

Modul ini digunakan untuk menyusun dan mengajukan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) termasuk revisi DIPA. Pengguna Anggaran (PA) dapat mengelola rencana anggaran secara lebih terstruktur dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

2. Modul Komitmen

Modul ini digunakan untuk mencatat semua perjanjian kontrak dan pengeluaran yang telah disetujui. Modul ini memastikan bahwa setiap komitmen anggaran tercatat dengan rinci dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Modul Pembayaran

Modul ini memfasilitasi proses pembayaran belanja negara secara langsung kepada rekening penerima dan mencatat semua pengeluaran.

Pembayaran yang tercatat dalam modul ini akan terintegrasi dengan realisasi penyerapan anggaran.

4. Modul Bendahara

Modul ini digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk mengelola transaksi keuangan, termasuk pencairan dana, pengelolaan kas dan proses validasi pengeluaran. Modul ini dirancang untuk memastikan semua transaksi sesuai dengan anggaran yang telah disetujui.

5. Modul Pelaporan

Modul ini menyediakan fitur untuk menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran. Dengan modul ini, proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan menjadi lebih mudah, akurat, dan tepat waktu, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semua modul dalam aplikasi SAKTI saling terintegrasi, sehingga mempermudah proses pengelolaan keuangan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas di tingkat instansi pemerintah.

2.1.5 Permasalahan dalam Pengelolaan Anggaran di Satuan kerja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

2.1.5.1 Revisi DIPA yang tidak sesuai SOP

Masalah utama yang dihadapi adalah proses pengajuan revisi DIPA yang sering diajukan berdekatan waktu atau bahkan setelah pelaksanaan kegiatan. Padahal, proses pengajuan revisi DIPA harus melalui beberapa tahapan dan membutuhkan waktu yang cukup.

2.1.5.2 Kendala dalam validasi pertanggungjawaban pengeluaran oleh

Bendahara Pengeluaran

Dikarenakan proses revisi yang dilakukan tidak tepat waktu, Bendahara Pengeluaran sering mengalami kendala dalam proses memvalidasi pertanggungjawaban pengeluaran anggaran yang telah terlaksana, karena belum ada dasar administrasinya. Hal ini menyebabkan terlambatnya proses validasi pertanggung jawaban pengeluaran anggaran karena proses revisi DIPA yang terlambat. Akibatnya, pelaporan pertanggungjawaban anggaran tertunda sehingga akuntabilitas keuangan tidak yang tercapai dengan baik.

2.1.6 Teori Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan merujuk pada proses pengelolaan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh sebuah organisasi, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga swasta. Proses ini mencakup perencanaan, penganggaran, pengalokasian dana, serta pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, pengelolaan keuangan memiliki tujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana serta memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkahnya.

1. Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan negara adalah proses pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengawasi keuangan negara agar digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang

Kuangan Negara, pengelolaan keuangan negara mencakup perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga negara(Amtiran & Molidya, 2020).

Proses ini dimulai dengan penyusunan anggaran yang melibatkan perencanaan pengeluaran dan pendapatan negara. Selanjutnya, anggaran yang telah disusun akan dieksekusi melalui mekanisme pengeluaran negara yang transparan. Selain itu, pertanggungjawaban keuangan negara menjadi bagian yang sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana negara sesuai dengan peraturan yang berlaku(Engkus *et al.*, 2020)

2. Teori Penganggaran

Teori penganggaran menjelaskan proses perencanaan dan pengalokasian dana yang akan digunakan oleh organisasi atau pemerintah. Penganggaran merupakan alat utama dalam pengelolaan keuangan untuk memastikan bahwa dana yang tersedia dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penganggaran memiliki dua fungsi utama, yaitu:

Fungsi alokasi: Mengalokasikan sumber daya ke dalam berbagai kegiatan yang dianggap penting.

- a. Fungsi distribusi: Mengatur distribusi dana yang tersedia sesuai dengan prioritas kegiatan dan kebutuhan.

Lebih lanjut, Novitasari & Amanah (2020) menekankan pentingnya penganggaran dalam memberikan gambaran jelas mengenai pembagian

sumber daya antara berbagai sektor dan aktivitas dalam organisasi atau pemerintah. Penganggaran yang baik harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam prosesnya.

3. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan adalah prinsip yang mengharuskan setiap tindakan pengelolaan keuangan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks instansi pemerintah, akuntabilitas berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran.

Rosidah *et al.* (2023) menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan memerlukan sistem pengawasan yang kuat dan struktur yang jelas untuk memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan dengan cara yang tepat. Tanpa akuntabilitas yang memadai, keuangan negara atau organisasi dapat disalahgunakan, yang berisiko menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

4. Sistem Informasi Keuangan

Sistem informasi keuangan adalah bagian penting dalam pengelolaan keuangan yang memungkinkan pengelolaan anggaran dan transaksi keuangan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efisien. Salah satu contoh sistem informasi keuangan yang digunakan di sektor publik adalah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yang digunakan oleh

instansi pemerintah untuk mengelola anggaran, transaksi, dan laporan keuangan secara terintegrasi (Aji, 2023)

Daeli & Citra (2024) menjelaskan bahwa sistem informasi keuangan yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih transparan dan terkontrol, sehingga mengurangi potensi kesalahan atau penyalahgunaan dana.

5. Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Pemerintahan

Pengelolaan keuangan dalam perspektif pemerintahan adalah tentang bagaimana pemerintah mengelola dana yang berasal dari pajak dan sumber daya negara lainnya untuk membiayai pembangunan serta memastikan kesejahteraan masyarakat. Amtiran & Molidya (2020) menekankan pentingnya perencanaan dan evaluasi dalam pengelolaan keuangan negara untuk memastikan bahwa setiap dana yang digunakan memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat.

Penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan negara juga sangat krusial, yang mengharuskan adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Al-Giffary & Nur Annisa, 2024).

6. Kontrol dan Audit Keuangan

Kontrol dan audit keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan yang sehat. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan keuangan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencapai tujuan yang diinginkan. Audit keuangan adalah proses yang sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti guna memberikan penilaian yang independen terhadap laporan keuangan.

Pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun dapat menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan yang harus segera ditindaklanjuti.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan aplikasi SAKTI dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan revisi DIPA yang tidak sesuai SOP. Kerangka pemikiran ini memfokuskan pada pemahaman tentang penggunaan aplikasi SAKTI, kendala dalam pengelolaan anggaran dan dampak dari proses revisi DIPA yang tidak sesuai prosedur terhadap pengelolaan keuangan di satuan kerja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

Dengan adanya landasan teori ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pengelolaan keuangan negara, serta bagaimana penerapan teknologi dalam pengelolaan anggaran agar dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

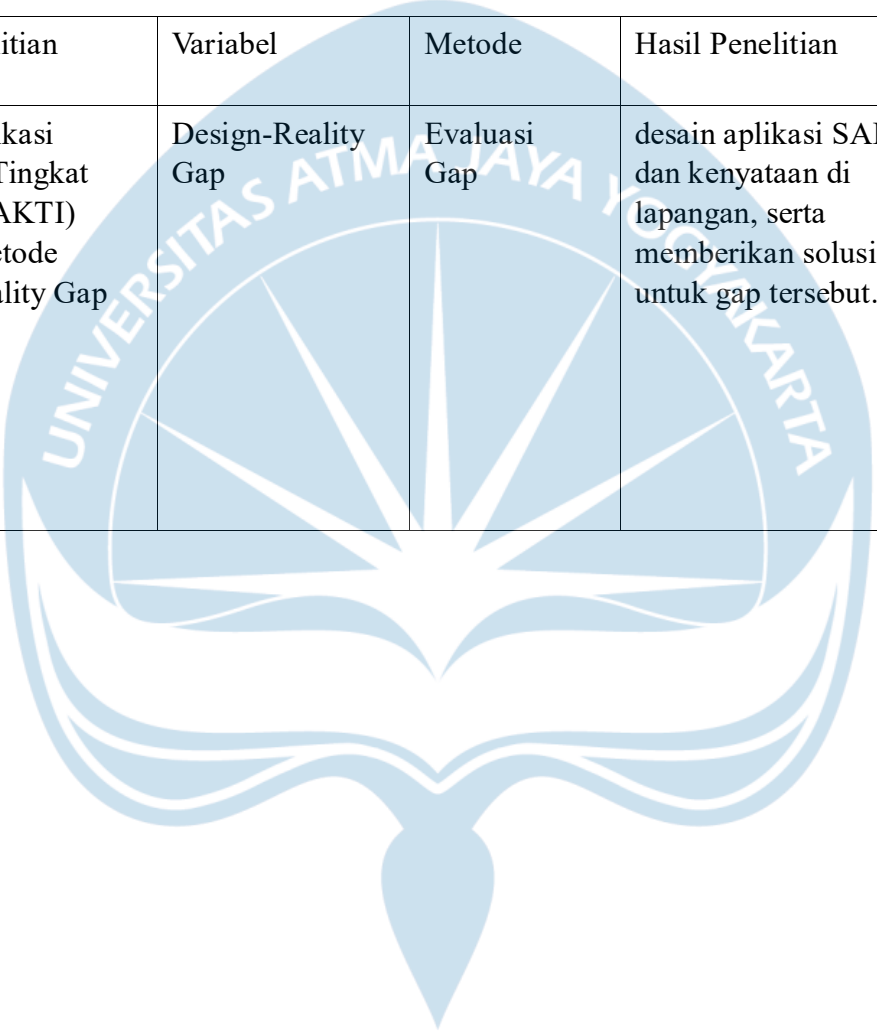
2.3 Penelitian Terdahulu

Penerapan aplikasi SAKTI sebagai bagian dari sistem pengelolaan anggaran di instansi pemerintah di Indonesia telah menarik perhatian dalam berbagai studi. Berbagai penelitian telah mengkaji efektivitas, kendala teknis, dan solusi dalam penggunaan aplikasi ini untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi anggaran di berbagai instansi. Penelitian terdahulu menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan aplikasi SAKTI yang masih perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah spesifik yang dihadapi oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta terkait pengelolaan anggaran dan revisi DIPA menggunakan aplikasi SAKTI.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Fernanda (2024)	Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk Penganggaran yang Efektif di Kejaksaan Lampung Tengah	Implementasi SAKTI, Efektivitas Anggaran	Analisis Kualitatif	SAKTI meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran meskipun ada kendala teknis seperti stabilitas sistem dan koneksi internet.	Fokus penelitian ini pada Kejaksaan Lampung Tengah, sementara penelitian ini mengkaji Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
2	Syahrir & Shakila (2024)	Analisis Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan di KPU Kota Bandung	Efisiensi, Efektivitas, SAKTI, Laporan Keuangan	Kuantitatif, Deskriptif	Penggunaan SAKTI terbukti efisien dan efektif dalam penyusunan laporan keuangan; diperlukan pelatihan rutin untuk pemahaman menyeluruh pegawai.	Fokus pada KPU dan pelaporan keuangan, bukan revisi DIPA atau kendala teknis di lingkungan pendidikan tinggi.

3	Oktasari & Slamet (2016)	Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Revisi Anggaran: Studi Kasus pada Kedeputan Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)	Revisi Anggaran, Proses Penganggaran	Studi Kasus, Analisis Kualitatif	Faktor revisi anggaran meliputi kendala penyusunan anggaran, masalah internal, dan kebijakan pemerintah.	Fokus pada revisi anggaran di LIPI, penelitian ini lebih menyoroti revisi DIPA di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
4	(Jayusman, 2021)	Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah pada MTS Negeri 1 Pangkalan Bun	Efektivitas Pengelolaan Anggaran	Kuantitatif, Survei	Pengelolaan anggaran di MTS Negeri 1 Pangkalan Bun efektif dengan adanya perbaikan sistem pelaporan anggaran.	Penelitian ini berfokus pada sekolah, sementara penelitian ini pada perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
5	(Kamala <i>et al.</i> , 2025)	Analisis Tantangan Dan Solusi Dalam Anggaran Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah, Tantangan, Solusi	Analisis Kualitatif dan Kuantitatif	Tantangan dalam anggaran belanja daerah meliputi masalah kebijakan dan ketidakselarasan anggaran dengan prioritas daerah.	Penelitian ini membahas anggaran daerah, sementara penelitian ini lebih fokus pada pengelolaan anggaran institusi pendidikan pemerintah pusat.
6	Gultom & Khudri	Evaluasi Implementasi	Implementasi SAKTI,	Metode Kualitatif,	Mengidentifikasi perbedaan antara	Fokus pada evaluasi gap antara



No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
	(2024)	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Dengan Metode Design-Reality Gap	Design-Reality Gap	Evaluasi Gap	desain aplikasi SAKTI dan kenyataan di lapangan, serta memberikan solusi untuk gap tersebut.	desain dan kenyataan, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada revisi DIPA dan pengelolaan keuangan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

Sumber: Peneliti (2025)

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, terdapat beberapa gap yang dapat dijadikan dasar bagi penelitian ini. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan SAKTI di berbagai instansi, seperti Kejaksaan Lampung Tengah dan Badan Pemeriksa Keuangan, dengan hasil yang menunjukkan bahwa SAKTI dapat meningkatkan efisiensi anggaran meskipun masih ada kendala teknis. Namun, sedikit penelitian yang secara spesifik mengkaji penerapan aplikasi SAKTI pada pengelolaan revisi DIPA yang tidak sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP), yang menjadi masalah utama di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dalam pengelolaan anggaran dan revisi DIPA, serta dampaknya terhadap pertanggungjawaban keuangan, khususnya terkait dengan waktu pengajuan revisi yang tidak tepat. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan solusi konkret yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penerapan aplikasi SAKTI di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, agar proses pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam bidang pengelolaan keuangan instansi pemerintah dengan menyoroti aspek revisi DIPA dan penerapan aplikasi SAKTI di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.